

## PRO KONTRA HUTANG DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR INDONESIA

Kevin Genjar S.N., Irene Oktavia, Yulian Ade Chandra  
Universitas Jember  
irene\_oktavia93@yahoo.com, vinz6103@gmail.com

### Abstrak

Hutang pemerintah Indonesia yang menembus angka Rp 4000 Triliun telah menjadi perhatian publik. Belum lagi penurunan subsidi yang diberikan pemerintah, lalu fokus pemerintah untuk membangun infrastruktur yang sepertinya agak memaksa. Pada artikel ini kami akan membahas tentang pro dan kontra hutang serta pembangunan infrastruktur Indonesia, membahas tentang proporsi hutang yang aman di suatu negara dan menjelaskan pentingnya pembangunan infrastruktur di suatu negara.

**Kata Kunci:** hutang Indonesia, pembangunan infrastruktur, Indonesia

### Abstract

*The Indonesian government's debts that reached Rp 4,000 Trillion has become a public concern. Not to mention the reduction of subsidies given by the government, then the government's focus to build infrastructure that seemed rather forced. In this article we will discuss about the pros and cons of debt as well as infrastructure development of Indonesia, discussed about the proportion of debt that is safe in a country and explain the importance of infrastructure development in a country.*

**Keywords:** Indonesia's debt, infrastructure development, Indonesia

## PENDAHULUAN

Anggaran merupakan sesuatu yang penting untuk dimiliki oleh sebuah instansi. Menurut Garrison, Norren and Brewer (2007:4), "Anggaran adalah rencana terperinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya selama suatu periode waktu tertentu."

Penyusunan anggaran bisa dibedakan berdasarkan institusinya, ada penyusunan anggaran sektor swasta/perusahaan dan ada penyusunan anggaran sektor publik. Keduanya berbeda dalam hal keterbukaan data. Menurut Mediaty dan Syarifudin (2010) pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor pemerintahan atau publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik dan didiskusikan dengan tujuan untuk mendapatkan masukan.

Keterbukaan data anggaran untuk sektor publik di Indonesia tertuang dalam APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. APBN adalah sebuah instrument kebijakan fiskal yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur dan mengarahkan perekonomian negara dan mengatur pendapatan serta pengeluaran negara. Pada tahun 2018 ini, APBN Indonesia memiliki tema "Pemantapan pengelolaan fiskal untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Menurut situs kementerian keuangan Indonesia, ada tiga kebijakan utama dalam APBN 2018 yaitu: : (1) Optimalisasi

## *Sinergitas Quadruple Helix: e-Business dan Fintech sebagai Daya Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal*

pendapatan negara melalui peningkatan rasio pajak dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan aset negara; (2) Penguatan kualitas belanja negara melalui peningkatan kualitas belanja modal yang produktif, efisiensi belanja non prioritas, sinergi antara program perlindungan sosial, refocusing anggaran prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk pengurangan kesenjangan dan perbaikan pelayanan publik; serta (3) kebijakan keberlanjutan dan efisiensi pembiayaan yang dilakukan melalui pengendalian defisit dan rasio utang, defisit keseimbangan primer yang semakin menurun, dan pengembangan creative financing, seperti melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU.

<b>TOTAL UTANG</b>	
September 2014	Rp 2.601,7 triliun
Desember 2014	Rp 2.608,8 triliun
September 2015	Rp 3.091,1 triliun
Desember 2015	Rp 3.165,1 triliun
September 2016	Rp 3.444,8 triliun
Desember 2016	Rp 3.515,5 triliun
September 2017	Rp 3.866,4 triliun
Total kenaikan utang negara 3 tahun terakhir	
<b>Rp1.264,73 triliun</b>	

Keterbukaan anggaran pemerintah ini menimbulkan banyak komentar dari berbagai pihak. APBN tahun 2018 ini dirasa berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya atau era pemerintahan sebelumnya. Pada sisi hutang terjadi kenaikan yang signifikan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa dalam 3 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, ada tambahan hutang negara hingga Rp 1.265 triliun. Dan posisi bulan April 2018, hutang Indonesia mencapai Rp 4.915 triliun. Pada Juni 2018 posisi pinjaman Indonesia yaitu Rp 785,13 T, dan SBN/ Surat Berharga Negara Rp 3.442,64T.

Beberapa ahli dan politikus Indonesia sudah mulai menyatakan bahwa posisi hutang Indonesia saat ini sudah mulai berbahaya. Dalam berita di BCC tanggal 13 Maret 2018 Ekonom INDEF, Enny Sri Hartati, menyebut jumlah utang tersebut "pasti tidak aman" karena bunga dan cicilannya dibayar dengan "gali lubang, tutup lubang". Utang baru dianggap aman kalau pelunasannya "tidak mengganggu likuiditas". Ketua Dewan Pembina Partai Beringin Karya (Berkarya), Hutomo Mandala Putra atau yang lebih dikenal dengan nama Tommy Soeharto juga menyatakan, saat ini ULN Indonesia memprihatinkan, karena mencapai tujuh kali lipat dibandingkan zaman kepemimpinan ayahnya, Soeharto, pada masa Orde Baru, yang berkisar US\$54 miliar atau sekitar Rp743 triliun.

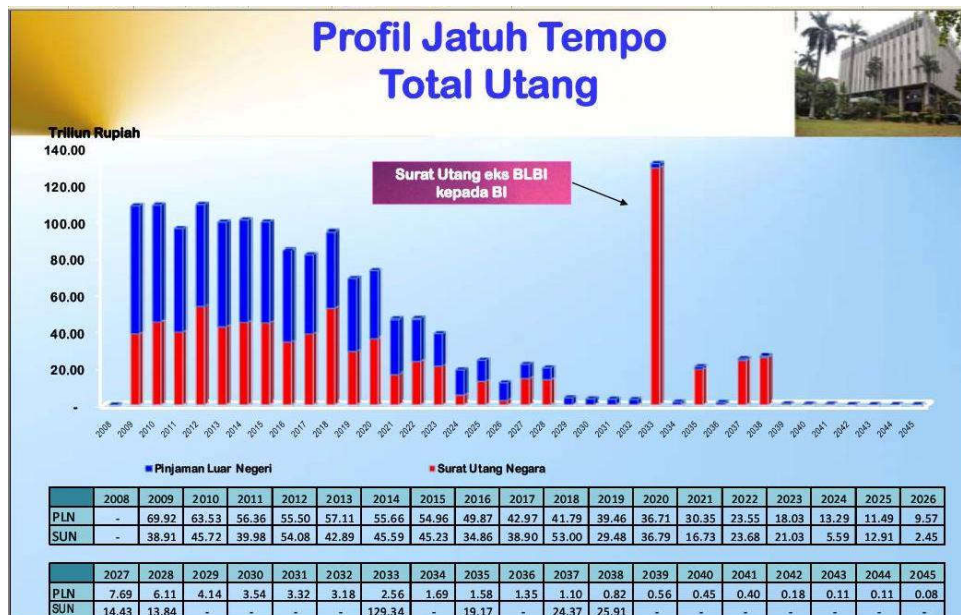
Namun dari pihak pemerintahan Jokowi menyatakan bahwa hutang tersebut masih dalam kondisi wajar. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa kondisi utang Indonesia "masih aman", karena jika dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) masih berada di kisaran 34% dan menambahkan utang tidak boleh melebihi 60% dari PDB negara.

PDB merupakan output atas seluruh unit usaha yang ada dalam wilayah negara tertentu. Definisi PDB menurut BPS (Badan Pusat Statistik) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.



Menurut Undang-Undang pasal 12 ayat 3 Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara menyebutkan bahwa defisit anggaran di batasi maksimal sebesar 3 % dan utang maksimal 60 % dari produk domestik bruto (PDB). Keadaan defisit anggaran masih di bawah batasan yang diamanatkan undang-undang, namun yang menjadi masalah adalah defisit anggaran yang dibiayai dengan utang dalam jangka panjang akan mempersempit ruang gerak fiskal.

Mengapa Indonesia harus berhutang? Salah satunya adalah untuk membayar hutang Indonesia lainnya yang jatuh tempo pada tahun-tahun ini

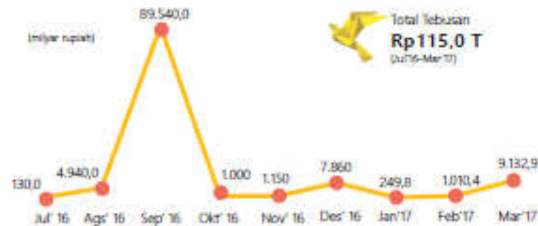


## Sinergitas Quadruple Helix: e-Business dan Fintech sebagai Daya Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Sebenarnya ada cara lain untuk meningkatkan pendapatan negara, salah satunya dengan menggiatkan pajak. Pemerintah harus dapat memaksimalkan potensi pajak yang ada di Indonesia. Salah satu cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan menjalankan Tax Amnesty. Tax Amnesty yang dicanangkan oleh pemerintah bisa memberikan kontribusi hingga Rp 115 Triliun pada tahun 2017.

### Tax Amnesty

Tax amnesty dilaksanakan sejak Juli 2016 hingga Maret 2017 dengan total tebusan sebesar Rp115,0 T



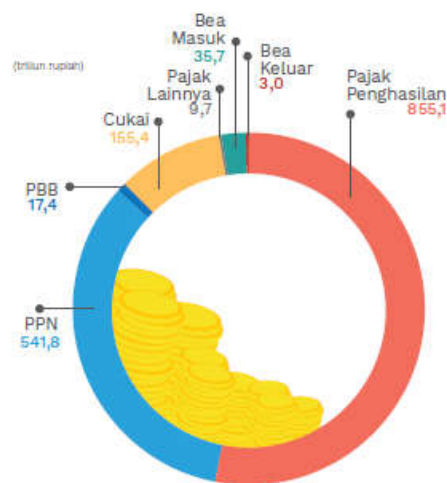
Selain Tax Amnesty agaknya pemerintah mulai melirik PPh. Pajak Penghasilan atau PPh merupakan penyumbang terbesar dalam pendapatan negara. Jika dilihat dari diagram berikut penerimaan PPh di Indonesia lebih dari 50% dari penerimaan perpajakan. Upaya pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pajak dilakukan dengan cara menerapkan peraturan tentang keterbukaan data perbankan masyarakat untuk “diintip” oleh pajak. Pertukaran Informasi Secara Otomatis (AeOI) ini tertuang dalam Peraturan Pengganti UU (Perppu) no.1 tahun 2017.

## Penerimaan Perpajakan

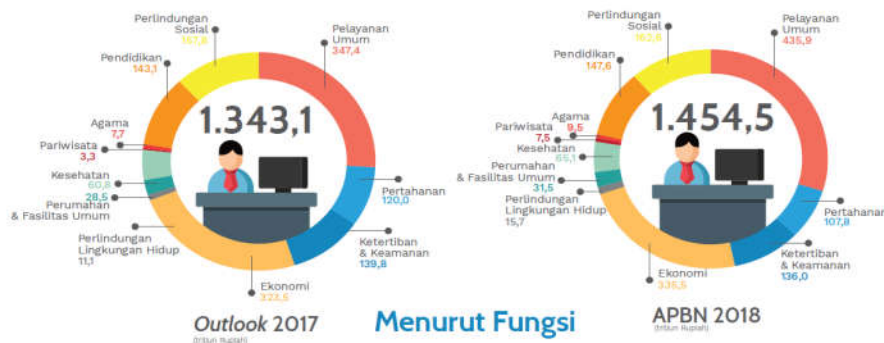
### Rp1.618,1 T

### PPh terbesar

Pajak penghasilan masih sebagai penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain perbaikan pertumbuhan perekonomian dan hasil kebijakan tax amnesty berupa penambahan basis pajak



Dari sisi belanja, APBN pemerintahan Jokowi meningkat belanja dalam beberapa bidang yaitu: kenaikan alokasi di bidang infrastruktur hingga 117% pada tahun 2017, alokasi untuk pendidikan meningkat 10%, alokasi untuk kesehatan meningkat sebesar 54%. Tampak jelas bahwa saat ini hutang negara digunakan untuk membangun infrastruktur. "Ketika mulai memerintah pada akhir 2014, hal pertama yang dicanangkan Jokowi adalah menggenjot infrastruktur. Pada APBN 2015, anggaran infrastruktur pun meningkat drastis menjadi Rp 290,3 triliun. Angka tersebut naik sekitar Rp 84 triliun dibandingkan APBN 2014, yang merupakan tahun terakhir pemerintahan SBY." (Berita BBC)



Namun ada pendapat yang menyatakan presiden Jokowi terlalu ambisius dalam membangun infrastruktur. Dalam artikel di Kompas, SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) menyatakan pemerintah sebaiknya tidak mengurus anggaran di sektor infrastruktur. Apalagi, kondisi ekonomi tanah air sedang lesu. "Saya mengerti, bahwa kita butuh membangun infrastruktur. Dermaga, jalan, saya juga setuju. Tapi kalau pengeluaran sebanyak-banyaknya dari mana? Ya dari pajak sebanyak-banyaknya. Padahal ekonomi sedang lesu," lanjut dia. SBY pun meminta pemerintah mengurangi belanja infrastruktur dengan menundanya untuk dikerjakan di tahun mendatang.

Pro dan kontra tentang hutang negara serta anggaran belanja untuk infrastruktur ini menjadi latar belakang penulisan artikel ini.

Sebegitu pentingkah pembangunan infrastruktur ini? Pembangunan infrastruktur ini sebenarnya sejalan dengan undang-undang rencana pembangunan jangka panjang Nasional tahun 2005-2025, terdapat Visi yaitu Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan delapan misi pembangunan nasional yang salah satunya berbunyi: Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan yakni meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh; keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek, termasuk gender. (LP3ES, Bappenas dalam sejarah perencanaan pembangunan indonesia 1945-2025; hal 34 – 2012). Pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi hanya bisa dicapai jika ada infrastruktur yang



baik yang menghubungkan wilayah antar daerah. Hal ini sesuai dengan teori *dual economy*, W. Arthur Lewis dan Simon Kuznets, mengacu pada sebuah sektor yang relatif berkembang (*advanced sector*) dan sebuah sektor yang relatif terbelakang (*backward sector*). Menurut Kuznets, esensi dari pertumbuhan ekonomi modern adalah pergeseran produksi secara bertahap dari sektor berpendapatan rendah menuju sektor berpendapatan tinggi.

Selain itu, hal ini juga sejalan dengan kebijakan yang populer di era nasionalisme ekonomi atau merkantilisme, kebijakan tersebut antara lain adalah:

- Tindakan proteksionisme untuk melindungi produsen-produsen dalam negeri yang belum mampu bersaing secara terbuka dengan industri-industri superior.
- Kebijakan perlindungan terhadap industri-industri yang baru tumbuh (*infant industries*) hingga memiliki kemampuan bersaing internasional dengan industri-industri yang sudah matang (*mature industries*)
- Peningkatan kualitas pendidikan nasional sebagai strategi untuk mengembangkan human capital dari suatu negara
- Negara memainkan peran dalam membangun infrastruktur dasar bagi berkembangnya industri dan perdagangan (Umar Suryadi: 2015)

Umar Suryadi dalam Bukunya Ekonomi Politik Internasional menyatakan konsep pembangunan lokal yang diarahkan untuk penguatan ekonomi domestik tersebut dalam ringkasan yang lebih padat setidaknya harus mengandung empat unsur berikut. Pertama, produktivitas (*productivity*) di mana rakyat harus mampu setiap waktu meningkatkan produktivitasnya dan berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan. Kedua, pemerataan (*equality*) di mana rakyat harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan (tidak ada diskriminasi). Ketiga, kesinambungan (*sustainability*) di mana pembangunan yang dikerjakan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sekarang tetapi juga untuk keperluan generasi yang akan datang. Keempat, pemberdayaan (*empowerment*) di mana pembangunan yang dikerjakan bukan hanya untuk rakyat.

Dalam usaha untuk membangun daerah yang terbelakang mempunyai beberapa tujuan, yaitu (a) untuk menaikkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja di daerah tersebut, (b) untuk merombak struktur ekonominya sehingga akan menjadi lebih kukuh dan dapat berkembang lebih pesat di masa yang akan datang, dan (c) untuk mengurangi arus perpindahan penduduk dari daerah lainnya yang lebih kaya.

Untuk mencapai tujuan tersebut beberapa kebijaksanaan dapat dijalankan, dan kebijaksanaan ini dalam garis besarnya dapat dibedakan dalam dua golongan. Pertama, kebijaksanaan tersebut dapat berbentuk berbagai macam peraturan yang bertujuan untuk melajukan perkembangan kegiatan ekonomi di daerah yang belum berkembang. Kedua, memperbaiki keadaan sarana ekonomi dan sosial di daerah yang pembangunannya sedang digalakkan dengan maksud agar daerah tersebut menjadi lebih menarik bagi para penanam modal.

Menurut Nugraheni, Pembangunan infrastruktur memiliki keterkaitan dengan penyerapan tenaga kerja, serta memiliki peran penting di suatu daerah dalam memperlancar kegiatan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah diyakini dapat menggerakkan sektor riil, menyerap tenaga kerja, meningkatkan konsumsi masyarakat dan pemerintah, serta memicu kegiatan produksi (Nugraheni, 2012).

Fokus pembangunan Infrastruktur pada tahun 2018 dijelaskan pada gambar berikut:



Pembangunan infrastruktur khususnya jalan memang diperlukan oleh Indonesia. Menurut Kurniawan (2014) infrastruktur jalan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, kondisi permukaan jalan sangat signifikan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan di suatu wilayah. Peningkatan kualitas permukaan jalan akan mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi dan akhirnya mampu meningkatkan pendapatan penduduk.

Penelitian serupa dalam buku *The Growth and Distributive Impacts of public Infrastructure Investments* menyatakan bahwa peningkatan investasi dalam sektor publik memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui akumulasi modal yang lebih tinggi, berdampak pada produksi agregat, alokasi sektoral produksi, kesejahteraan rumah tangga, kemiskinan dan kesetaraan ekonomi.

Penelitian dari Erwin Corong (2013) menyatakan bahwa infrastruktur publik yang semakin baik akan meningkatkan rasio investasi terhadap PDB dan menghasilkan efek GDP yang positif dan mengurangi kemiskinan serta ketidaksetaraan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

## **METODOLOGI**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi teori yang diperoleh dengan jalan penelitian studi literatur dijadikan sebagai fondasi dasar dan alat utama bagi praktek penelitian ditengah lapangan.

### **Metode Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dengan melakukan observasi dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari jurnal, buku dokumentasi, dan internet.

### **Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan metode untuk mencari dokumen atau data-data yang dianggap penting melalui artikel koran/majalah, jurnal, pustaka, brosur, buku dokumentasi serta melalui media elektronik yaitu internet, yang ada kaitannya dengan diterapkannya penelitian ini.

### **Studi Literatur**

Studi literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber, jurnal, buku dokumentasi, internet dan pustaka.

### **Metode Analisis Data**

Data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis, tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Masalah hutang negara yang kian membesar menjadi polemik di tengah masyarakat. Adanya tambahan unsur politik semakin memperkeruh suasana. Hutang-hutang yang ada seolah dibesar-besarkan oleh kubu lawan politik. Pemerintah dianggap tidak bisa mengelola perekonomian negara dengan baik. Sebenarnya seberapa besar hutang negara Indonesia? Jika ditinjau dari sisi perbandingan hutang dengan produk domestik bruto masih relatif aman yaitu dibawah 30%. Namun PDB tidak bisa dijadikan tolok ukur kemampuan negara untuk membayar hutang. PDB adalah nilai pasar dari barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam periode tertentu.



Jika mau dibandingkan, sebaiknya hutang dibandingkan dengan kemampuan negara untuk membayar. Kemampuan negara untuk membayar bisa ditinjau dari penerimaan negara seperti pajak.

Melihat tentang kebijakan pemerintah, kita tidak bisa melihatnya sebagai satu sisi saja. Hutang memang merupakan salah satu kebijakan pemerintah, namun ada kebijakan ekonomi pemerintah lainnya yang pasti akan berhubungan dengan hutang tersebut. Seperti misalnya kebijakan tentang keterbukaan data perbankan untuk pajak yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 1 tahun 2017. Peraturan tersebut membuat Dirjen Pajak bisa “mengintip” rekening masyarakat dan memastikan pajak yang dibayar oleh masyarakat sesuai dengan penghasilan yang dimiliki. Tidak bisa dipungkiri bahwa pajak merupakan sumber pendapatan utama dari pemerintah.

Jika dilihat di sisi kiri neraca, aset Indonesia sebenarnya telah mengalami peningkatan yang cukup baik yaitu sekitar 239% menjadi 2648 triliun pada tahun 2017. Maka bisa diartikan bahwa ekonomi Indonesia terus tumbuh. Selain itu laju inflasi juga masih dalam batas yang normal dan kecil yakni masih dibawah 10%

Proporsi utang yang ada di Indonesia juga tidak sepenuhnya adalah hutang luar negeri. Pemerintah juga menerbitkan SBN/Surat Berharga Negara untuk dibeli oleh masyarakat sebagai salah satu instrument investasi. SBN ini juga dikeluarkan untuk mengurangi hutang kepada pihak asing dan mengurangi intervensi pihak asing kepada negara. Pemerintah mulai mengurangi jumlah utang G2G atau government to government untuk mengurangi intervensi dari pihak luar.

Jika ditinjau dari belanja pemerintah, infrastruktur memang menjadi fokus utama dari pemerintahan saat ini. Selain pemerintah membangun infrastruktur dari segi transportasi atau logistik seperti pembangunan jalan khususnya jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandar udara, pemerintah juga memperhatikan hal-hal lain misalnya dari segi pertanian seperti melanjutkan dan membuat proyek waduk, ataupun penunjang lain seperti pembangunan jalur telekomunikasi, pembuatan pembangkit listrik tenaga terbarukan (seperti PLT Angin di kab. Sidrap yang baru diresmikan) serta pembangunan rumah rakyat (misal rumah bersubsidi dan rumah susun).

Memang beberapa pembangunan infrastruktur tidak bisa dirasakan secara langsung manfaatnya, tetapi jika dilihat untuk ke depannya, pembangunan infrastruktur tidak hanya menguntungkan *businessman* tingkat atas saja tetapi juga kalangan lain pasti akan mendapatkan keuntungan tersebut misalnya seperti jalur logistik lebih mudah dan murah. Bertrand Badre seorang *World Bank Managing Director&Chief Financial Officer* mengakui bahwa adanya infrastruktur sangatlah penting bagi suatu negara karena akan membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terbukanya lapangan kerja, dan akses distribusi yang lebih mudah. Beliau beropini pada tulisannya di situs resmi [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org) bahwa infrastruktur bisa mengurangi kemiskinan, meningkatkan standar hidup untuk semua (karena tersedianya air bersih, listrik dsb.) dan membantu negara dalam memanfaatkan potensinya secara maksimal.

Pada intinya infrastruktur mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi khususnya Indonesia. Peneliti terdahulu menjelaskan bahwa Kondisi jalan infrastruktur dan listrik secara signifikan mempengaruhi pendapatan per kapita (Maryaningsih dkk., 2014). Statemen ini diperkuat dengan adanya data pendapatan per kapita tiap provinsi pada tiap-tiap pulau. Dari data yang disajikan, pulau Jawa lah yang memegang pendapatan per kapita paling tinggi dari pulau lain karena memang infrastukturnya lebih memadai ketimbang pulau lainnya. Dapat disimpulkan bahwa jika pemerintah memperhatikan dan membangun infrastruktur di luar pulau Jawa khususnya pada provinsi yang infrastrukturnya masih terbatas, akan dapat meningkatkan pendapatan per kapita pada provinsi tersebut.

Memang dana untuk pembangunan infrastruktur sekarang masih didapat dari berhutang dan sebagian merupakan investasi dari investor asing, namun jika tidak dimulai dari sekarang, rencana pemerataan pembangunan pemerintah akan terus tertunda dan akan berlangsung semakin lama. Selain itu, pemerintah pasti memperhitungkan secara matang tentang keputusan berhutangnya tersebut. Dengan beracuan pada pagu atau batas tertinggi utang yang telah ditetapkan yakni sebesar maksimal 60% dari PDB & defisit anggaran maksimal 3%, pemerintah yakin hutang luar negeri Indonesia masih dalam batas “aman”. Selama pengelolaan keuangan negara (termasuk hutang) masih aman dalam artian terbuka dan tidak ada penggelapan atau penyelewengan serta sesuai dengan rancangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka tidak perlu terlalu khawatir akan kondisi negara kita ini.

## **KESIMPULAN**

Hutang tidaklah selamanya buruk. Sebagian orang beranggapan bahwa hutang itu harus dihindari karena akan menimbulkan dampak yang negatif, namun sebagian lainnya menganggap hutang itu sah-sah saja asalkan dipergunakan dengan baik. Salah satu alasan kenapa pemerintah harus berhutang lagi yaitu untuk menutup hutang dari periode sebelumnya yang jatuh tempo saat ini. Sisanya digunakan untuk membangun peradaban, seperti infrastruktur yang memadai & merata.

Infrastruktur merupakan hal yang genting untuk dibangun saat ini. Dengan adanya infrastruktur yang baik, akan menimbulkan koneksi/hubungan antar wilayah dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata terhadap tiap-tiap daerah yang dilalui oleh infrastruktur tersebut. Penulis yakin bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh dalam mengendalikan hutangnya. Pemerintah juga pasti memperhitungkan secara matang tentang keputusan berhutangnya tersebut

## **KETERBATASAN**

Penelitian ini merupakan studi pustaka yang hanya mengambil beberapa artikel atau penelitian sebelumnya, penelitian ini bisa dilanjutkan dengan melakukan perhitungan data dengan metode kuantitatif. Literatur untuk thesis terbaru yang mengangkat masalah hutang di Indonesia juga belum ditemukan. Kalau memang ada, jumlahnya masih sedikit atau terhitung jari.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Prof. Isti Fadah, dan Prof Hari Sukarno yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuangkan pemikiran dalam artikel ini. Terimakasih kepada teman-teman Magister Manajemen angkatan 2017. Terimakasih kepada orang tua dan keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bakry, Umar S. 2015. *Ekonomi Politik Internasional, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bertrand Badre. 2014. <http://www.worldbank.org/en/news/opinion/2014/02/28/the-importance-of-infrastructure-for-economic-growth-jobs-and-access-to-markets-and-services-in-solomon-islands>. Diakses pada tanggal 12 September 2018
- Cockburn, John and Yazid D. 2013. *Infrastructure and Economic Growth in Asia*. Springer Science Business Media.
- Corong, Erwin, et.al. 2013. *The growth and Distributive Impacts of Public Infrastructure Investment in the Philippines*.
- Garrison, R. H., Noreen, E. W., dan Brewer, P. C. (2007). *Akuntansi Manajerial*: edisi 11, buku2. (Diterjemahkan oleh : Nur Hinduan dan Edward Tanujaya).
- [http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file\\_storage\\_1386152419.pdf](http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386152419.pdf). Diakses pada tanggal 12 September 2018
- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43373257>. Diakses pada tanggal 11 September 2018
- <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/apbn-adalah-instrumen-pendorongpertumbuhan-dan-pemerataan-ekonomi-nasional/>.Diakses pada tanggal 11 September 2018
- Kurniawan, D.A. 2014. Peran Transportasi Jalan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Simposium XXI FSTPT*. Universitas Petra Surabaya.
- Marta, M. Fajar. 2016. <https://ekonomi.kompas.com/read/2016/03/22/060000726/Jokowi.SBY.dan.-Infrastruktur> .Diakses pada tanggal 10 September 2018
- Maryaningsih, N. Dkk. 2014. The Roleof Infrastructureon Economic Growthin Indonesia. *Bulletin of Monetary, Economics and Banking*, Volume 17, Nomor 1, July 2014.
- Muhlis, Syarifuddin Dan Mediaty. 2009. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dengan Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi Sebagai Moderator (studi kasus pada pemerintah Kabupaten Barru Sul-Sel).
- Mustopadidjaja, AR. 2012. *Bappenas dalam Sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia 1945-2025*. LP3ES
- Nugraheni, D. 2012. Kinerja Keuangan Daerah, Infrastruktur, Kemiskinan : Analisis Kabupaten/Kota Di Indonesia 2006 – 2009. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Bogo